



EKONOMI DAN POLITIK KONTEMPORER

— PERSPEKTIF GLOBAL —
DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Oleh

— RUDY C TARUMINGKENG —

“Memahami dinamika ekonomi dan politik global
adalah kunci merancang strategi Indonesia
yang tangguh, inklusif, dan berdaulat.”



**PERSPEKTIF
GLOBAL**

Membaca perubahan
ekonomi-politik dunia



**ANALISIS
MENDALAM**

Mengurai tren, tantangan,
dan peluang strategis



**IMPLIKASI BAGI
INDONESIA**

Menentukan langkah
kebijakan yang relevan



**TRANSFORMASI
DIGITAL**

AI, inovasi, dan ekonomi
di masa depan



**DAYA TAHAN &
KEADILAN**

Membangun pertumbuhan
yang berkelanjutan

*Rudy C Tarumingkeng: Ekonomi dan Politik Kontemporer:
Perspektif Global dan Implikasinya bagi Indonesia*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudymt75@gmail.com

8 April 2026

EKONOMI DAN POLITIK KONTEMPORER: PERSPEKTIF GLOBAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Abstrak

Makalah ini membahas hubungan antara ekonomi dan politik kontemporer dalam konteks dunia yang semakin ditandai oleh ketidakpastian, fragmentasi perdagangan, rivalitas geopolitik, konsentrasi kekuasaan digital, dan tekanan terhadap demokrasi. Tesis utama tulisan ini adalah bahwa ekonomi modern tidak pernah bekerja dalam ruang hampa; pasar selalu dibentuk oleh institusi, keputusan politik, kekuatan korporasi, teknologi, dan respons masyarakat. Karena itu, pertumbuhan ekonomi tidak dapat dibaca hanya sebagai kenaikan output, melainkan juga sebagai hasil dari distribusi kekuasaan dan kualitas tata kelola. IMF memproyeksikan pertumbuhan global melambat dari 3,3 persen pada 2024 menjadi 3,2 persen pada 2025 dan 3,1 persen pada 2026. WTO, pada saat yang sama, memperkirakan volume perdagangan barang dunia 2025 dapat berbalik menjadi kontraksi 0,2 persen setelah memperhitungkan tarif baru dan meningkatnya ketidakpastian kebijakan perdagangan. UNDP juga menunjukkan bahwa kenaikan HDI global merupakan yang terendah sejak pencatatan dimulai 35 tahun lalu, sementara V-Dem mencatat 74

persen populasi dunia kini hidup dalam rezim autokratis dan demokrasi rata-rata warga dunia telah mundur ke level 1978. Di tengah perubahan tersebut, AI dan ekonomi digital membuka peluang produktivitas baru, tetapi juga memusatkan kapasitas komputasi, data, dan inovasi pada sedikit negara dan perusahaan. Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11 persen, penurunan kemiskinan menjadi 8,25 persen, dan turunnya gini ratio menjadi 0,363 merupakan capaian penting, tetapi belum menghapus kerentanan struktural seperti dualisme kota-desa, kualitas pekerjaan, dan keterpaparan terhadap guncangan eksternal, sebagaimana terlihat pada tekanan terhadap rupiah pada April 2026. Makalah ini menyimpulkan bahwa Indonesia memerlukan sintesis baru: negara yang strategis namun akuntabel, pasar yang dinamis namun tidak oligarkis, serta masyarakat yang adaptif namun tetap terlindungi. ([IMF](#))

Kata kunci: *ekonomi politik, pertumbuhan, ketimpangan, geoeconomics, demokrasi, AI, Indonesia, ketidakpastian global*

Ekonomi dan Politik Kontemporer: Perspektif Global dan Implikasinya bagi Indonesia

1. Pendahuluan

Membicarakan ekonomi dan politik kontemporer berarti memasuki ruang analisis di mana batas antara pasar dan kekuasaan semakin kabur. Dalam wacana lama, ekonomi kerap dipahami sebagai ranah rasionalitas, efisiensi, dan kalkulasi, sementara politik dianggap sebagai ranah kekuasaan, ideologi, dan legitimasi. Namun perkembangan global beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pemisahan semacam itu tidak lagi memadai. Tarif perdagangan, sanksi,

perang energi, perlindungan industri, pengendalian data, dan kebijakan terhadap AI menunjukkan bahwa hampir semua keputusan ekonomi strategis dewasa ini merupakan keputusan politik sekaligus. IMF, misalnya, menggambarkan 2025 sebagai tahun yang “fluid and volatile,” didorong oleh penataan ulang prioritas kebijakan di Amerika Serikat dan penyesuaian kebijakan di ekonomi lain. WTO bahkan menilai bahwa perubahan tarif dan ketidakpastian kebijakan perdagangan telah cukup untuk membalik prospek perdagangan dunia pada 2025. ([IMF](#))

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa dunia tidak sedang mengalami sekadar perlambatan siklus biasa. Dunia sedang menghadapi perubahan dalam “aturan permainan” itu sendiri. IMF memperkirakan pertumbuhan global turun dari 3,3 persen pada 2024 menjadi 3,2 persen pada 2025 dan 3,1 persen pada 2026. WTO menurunkan proyeksi perdagangan barang global 2025 menjadi minus 0,2 persen, setelah sebelumnya baseline-nya jauh lebih tinggi, karena dampak tarif dan ketidakpastian kebijakan. Ketika prospek ekonomi dapat berubah bukan terutama karena inovasi atau permintaan, tetapi karena kebijakan perdagangan dan ketegangan geopolitik, maka ekonomi politik menjadi lensa yang tak terelakkan. ([IMF](#))

Perkembangan mutakhir pada awal April 2026 semakin menegaskan hal ini. Reuters melaporkan bahwa IMF memperingatkan perang di Timur Tengah akan mendorong inflasi lebih tinggi dan pertumbuhan lebih lambat, bahkan bila konflik mereda relatif cepat. Reuters juga melaporkan bahwa banyak bank sentral kini melihat ketegangan geopolitik sebagai risiko utama bagi ekonomi global, sementara Indonesia harus mengintervensi pasar valuta asing setelah rupiah menyentuh rekor terendah pada 7 April 2026. Semua ini menunjukkan bahwa ketidakpastian global bukan lagi gangguan sesaat, melainkan

kondisi struktural baru yang memengaruhi kehidupan ekonomi nasional. ([Reuters](#))

Makalah ini bertujuan menjelaskan ekonomi dan politik kontemporer dari perspektif global, lalu menurunkannya ke dalam implikasi bagi Indonesia. Secara khusus, tulisan ini akan menyoroti lima tema utama: pertama, perubahan lanskap global dari globalisasi berbasis efisiensi ke globalisasi berbasis ketahanan; kedua, kembalinya negara strategis; ketiga, hubungan antara pertumbuhan, ketimpangan, dan pembangunan manusia; keempat, konsentrasi kekuasaan dalam ekonomi digital dan AI; dan kelima, tantangan Indonesia dalam membangun daya tahan, keadilan, dan legitimasi di tengah perubahan tersebut. ([IMF](#))

2. Kerangka Konseptual: Ekonomi Politik sebagai Analisis atas Relasi Kuasa

Ekonomi politik berangkat dari premis bahwa pasar bukan institusi yang sepenuhnya alamiah. Harga, hak kepemilikan, tarif, subsidi, regulasi persaingan, upah minimum, perlindungan sosial, dan batasan terhadap data semuanya dibentuk oleh keputusan hukum dan politik. Karena itu, pertanyaan utama ekonomi politik bukan hanya "berapa besar pertumbuhan," tetapi juga "siapa yang menentukan aturan pertumbuhan," "siapa yang menikmati manfaatnya," dan "siapa yang menanggung ongkos perubahannya." Dalam dunia kontemporer, pertanyaan-pertanyaan ini semakin penting karena sumber kekuasaan tidak lagi terbatas pada negara, tetapi juga mencakup platform digital, jaringan cloud, pusat data, arsitektur pembayaran, dan rantai pasok global.

Pendekatan ini membantu kita memahami bahwa pasar modern tidak bisa dibaca semata dari sisi efisiensi. WTO menekankan bahwa ketidakpastian kebijakan perdagangan memengaruhi keputusan investasi jangka panjang, memasuki pasar baru, dan pembangunan rantai pasok internasional. Ketika ketidakpastian meningkat,

perusahaan cenderung menunda investasi, mengecilkan ekspansi, dan mengurangi eksposur lintas batas. Jadi, yang berubah bukan hanya arus perdagangan, tetapi juga orientasi strategi korporasi. Dengan kata lain, struktur pasar sangat dipengaruhi oleh persepsi atas kebijakan negara.

Ekonomi politik juga menempatkan distribusi di pusat analisis. Pertumbuhan yang tinggi belum tentu menghasilkan legitimasi sosial bila manfaatnya terkonsentrasi. UNDP memperingatkan bahwa kemajuan pembangunan manusia global melambat tajam dan jurang antara negara ber-HDI sangat tinggi dan sangat rendah kembali melebar. Ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi global hari ini belum otomatis diikuti pelebaran kesempatan manusia yang setara. Dari sini tampak bahwa masalah ekonomi kontemporer bukan hanya bagaimana memperbesar kue, melainkan juga bagaimana kue itu dibagi dan siapa yang berhak menetapkan aturan pembagiannya.

Dalam kerangka inilah ekonomi dan politik kontemporer dapat dibaca sebagai studi tentang interaksi antara negara, pasar, dan masyarakat. Negara berusaha mengelola stabilitas, keamanan, dan legitimasi. Pasar berusaha mencari efisiensi, skala, dan keuntungan. Masyarakat menuntut pekerjaan, perlindungan, partisipasi, dan keadilan. Ketika hubungan ketiganya seimbang, pembangunan dapat relatif stabil. Ketika salah satu mendominasi secara berlebihan, ketegangan pun muncul: negara bisa menjadi eksklusif, pasar bisa menjadi oligarkis, dan masyarakat bisa menjadi rapuh atau marah. ([IMF](#))

3. Lanskap Global Kontemporer: Pertumbuhan yang Melambat, Perdagangan yang Tertekan

Perspektif global atas ekonomi politik kontemporer harus dimulai dari gambaran makro yang sederhana tetapi penting: dunia masih bertumbuh, namun bertumbuh dalam keadaan rapuh. IMF memproyeksikan pertumbuhan global turun dari 3,3 persen pada 2024 menjadi 3,2 persen pada 2025 dan 3,1 persen pada 2026. Angka ini

tidak berarti krisis langsung, tetapi menunjukkan ekonomi dunia bergerak di bawah tekanan. Bahkan IMF menekankan bahwa trade policy uncertainty diperkirakan tetap tinggi sepanjang 2025–2026, khususnya karena ketegangan tarif dan proses hukum di AS terkait dasar pengenaan tarif. ([IMF](#))

Dari sisi perdagangan, sinyalnya lebih keras. WTO menyatakan bahwa setelah menyesuaikan proyeksi terhadap tarif baru dan heightened trade policy uncertainty, ekonom WTO kini memperkirakan kontraksi 0,2 persen pada perdagangan barang 2025. WTO juga menjelaskan bahwa ketidakpastian semacam ini penting karena perusahaan bergantung pada kebijakan perdagangan yang stabil dan dapat diprediksi saat membuat komitmen jangka panjang. Ketika masa depan tarif dan hubungan dagang menjadi kabur, investasi tertahan, produktivitas merosot, dan pertumbuhan akhirnya ikut turun.

Implikasi dari dua data ini sangat besar. Selama beberapa dekade, perdagangan internasional dianggap salah satu mesin utama pertumbuhan global. Ketika perdagangan melambat akibat pilihan-pilihan politik, negara-negara tak bisa lagi sekadar mengandalkan integrasi global. Mereka harus menata ulang strategi domestik, diversifikasi mitra, dan membangun ketahanan sendiri. Inilah sebabnya mengapa ekonomi dunia kini bergerak dari globalisasi berbasis efisiensi menuju globalisasi berbasis ketahanan. Biaya terendah tidak lagi selalu menjadi pertimbangan utama; keamanan pasokan, kedekatan geopolitik, dan kestabilan aturan juga menjadi faktor penting.

Perang di Timur Tengah pada April 2026 memperlihatkan bagaimana cepatnya risiko geopolitik menerjemahkan diri menjadi risiko ekonomi. Menurut Reuters, IMF memperingatkan bahwa semua jalan kini mengarah pada harga yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih lambat karena gangguan pasokan energi dan rantai pasok. Reuters juga melaporkan bahwa lonjakan harga minyak menaikkan risiko resesi

global, memukul pabrik, memperbesar biaya pupuk, dan menekan mata uang di Asia. Ini menegaskan satu hal mendasar: ekonomi global kontemporer semakin ditentukan oleh konflik atas jalur energi, logistik, dan keamanan, bukan semata oleh mekanisme pasar konvensional. ([Reuters](#))

4. Dari Globalisasi Efisiensi ke Globalisasi Ketahanan

Perubahan global paling penting dewasa ini ialah pergeseran orientasi dari efisiensi murni ke ketahanan. Pada masa lalu, banyak perusahaan global mengoptimalkan rantai pasok berdasarkan upah murah, skala besar, dan logistik yang efisien. Namun WTO menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan yang tidak dapat diprediksi dapat membuat perusahaan menunda investasi, mengecilkan ambisi ekspor, dan membatasi ekspansi internasional. Ketika itu terjadi dalam banyak sektor sekaligus, efisiensi global yang sebelumnya dibangun dalam beberapa dekade menjadi lebih rapuh.

Ketahanan di sini berarti kemampuan bertahan dari disrupsi. Negara dan perusahaan kini lebih memikirkan keamanan semikonduktor, mineral kritis, cloud, pelayaran, pangan, dan energi. Dengan kata lain, rantai pasok berubah dari sekadar jaringan produksi menjadi infrastruktur kekuasaan. Mereka yang menguasai titik-titik penting dalam rantai itu memperoleh leverage ekonomi sekaligus politik. Karena itulah isu tarif, friend-shoring, reshoring, dan pembatasan ekspor menjadi semakin menonjol dalam ekonomi politik kontemporer.

Namun globalisasi berbasis ketahanan juga mempunyai ongkos. Ia cenderung lebih mahal, kurang efisien, dan berpotensi menciptakan blok-blok ekonomi. Negara maju dapat menanggung biaya penyesuaian lebih baik, tetapi negara berkembang menghadapi dilema yang lebih berat. Mereka tetap membutuhkan pasar global untuk tumbuh, tetapi juga harus menyiapkan strategi jika akses pasar atau rantai pasok terganggu. Karena itu, fragmentasi global tidak

hanya soal geopolitik negara besar, tetapi juga soal menyempitnya ruang manuver negara berkembang. UNDP menunjukkan bahwa jalur pembangunan yang dahulu membantu banyak negara naik kelas kini semakin sulit dipertahankan.

Dalam konteks ini, pertanyaan untuk negara seperti Indonesia menjadi semakin strategis: apakah Indonesia akan terus berposisi terutama sebagai pemasok komoditas dan pasar konsumen, atau berusaha membangun kapasitas industri, teknologi, dan logistik yang lebih dalam? Perspektif global memberi pesan jelas bahwa ketahanan nasional tidak mungkin dibangun hanya dengan mengandalkan pasar yang terbuka, karena pasar global sendiri kini bergerak dalam atmosfer politik yang lebih keras.

5. Kembalinya Negara Strategis

Di tengah ketidakpastian global, negara kembali menonjol sebagai aktor sentral. IMF menegaskan bahwa dinamika ekonomi 2025 banyak dipengaruhi penataan ulang prioritas kebijakan negara besar. WTO juga menunjukkan betapa besar efek kebijakan negara terhadap perdagangan dunia. Ini berarti narasi lama tentang "mundurnya negara" tidak lagi memadai. Yang terjadi justru kebalikannya: negara kembali aktif lewat kebijakan industri, tarif, subsidi, regulasi teknologi, kontrol data, dan intervensi pasar keuangan. ([IME](#))

Namun kembalinya negara tidak identik dengan penyelesaian masalah. Negara yang kuat bisa membangun kapasitas industri, memperkuat ketahanan energi, menjaga stabilitas makro, dan melindungi kelompok rentan. Tetapi negara yang kuat juga dapat menjadi alat distribusi rente, patronase, dan konsolidasi elite bila tidak diawasi. Di sinilah hubungan antara ekonomi dan politik menjadi krusial. Efektivitas negara harus selalu dibaca bersama akuntabilitasnya. V-Dem menunjukkan bahwa demokrasi global sedang merosot: 74 persen populasi dunia hidup dalam autokrasi, hanya 26 persen dalam demokrasi, dan hanya 7 persen dalam

demokrasi liberal. Artinya, perluasan peran negara di banyak tempat berlangsung justru ketika mekanisme pengawasan publik sedang melemah. ([V-Dem](#))

Kecenderungan ini penting untuk dibaca secara hati-hati. Di era perang, ketegangan energi, dan persaingan teknologi, masyarakat sering menerima gagasan bahwa negara harus bertindak lebih tegas. Itu memang masuk akal sampai batas tertentu. Tetapi ketika kebijakan strategis tidak diimbangi transparansi dan checks and balances, hasilnya bisa kontraproduktif. Negara mungkin tampak kuat dalam jangka pendek, tetapi kehilangan kemampuan untuk belajar dan mengoreksi diri. Dalam jangka panjang, itu dapat menghambat produktivitas, inovasi, dan legitimasi. ([V-Dem](#))

Dengan demikian, persoalan utama ekonomi politik global bukan sekadar apakah negara harus hadir, melainkan bagaimana bentuk kehadiran negara itu. Dunia kini memerlukan negara yang strategis, tetapi juga dapat diawasi; negara yang mampu bertindak, tetapi tidak anti-kritik; negara yang membangun kapasitas publik, bukan hanya kapasitas elite. Ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia. ([IMF](#))

6. Pertumbuhan, Pekerjaan, dan Ketimpangan Sosial

Pertumbuhan ekonomi selalu penting, tetapi pertumbuhan yang tidak berkualitas dapat melahirkan paradoks. Banyak negara masih bertumbuh, tetapi warganya tidak otomatis merasa aman. ILO melaporkan bahwa pada 2024 pertumbuhan pekerjaan global hanya cukup mengikuti pertumbuhan angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran global tetap 5 persen. Namun pengangguran kaum muda masih tinggi di 12,6 persen, dan kerja informal serta working poverty telah kembali ke tingkat pra-pandemi. Ini menunjukkan bahwa masalah utama dunia kerja bukan hanya jumlah pekerjaan, tetapi juga kualitas pekerjaan. ([International Labour Organization](#))

Ketimpangan juga tidak bisa hanya dibaca dari distribusi pendapatan. Ketimpangan hari ini menyangkut akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, konektivitas digital, keterampilan, dan perlindungan sosial. UNDP menunjukkan bahwa dunia memang masih mencatat rekor HDI baru pada 2024, tetapi kenaikannya adalah yang terendah sejak 35 tahun pencatatan dimulai. Lebih jauh lagi, dunia yang dulu diperkirakan akan memasuki tahap “very high HDI” sekitar 2030 kini diproyeksikan tertunda beberapa dekade. Ini bukan sekadar penurunan kecepatan, melainkan tanda bahwa model pembangunan global sedang kehilangan daya transformasinya.

Secara sosial, kondisi ini menciptakan masyarakat yang gelisah. Rumah tangga tidak menilai ekonomi dari angka PDB semata, tetapi dari harga pangan, biaya energi, kualitas kerja, dan harapan masa depan anak-anak mereka. Ketika ekonomi tumbuh tetapi rasa aman sosial tidak ikut tumbuh, maka statistik makro dan pengalaman hidup sehari-hari mulai terpisah. Jurang antara keduanya sering menjadi bahan bakar populisme, kemarahan, dan kecurigaan terhadap elite. Di sinilah ketimpangan berubah menjadi masalah politik, bukan hanya ekonomi. ([International Labour Organization](#))

Dari perspektif global, tantangannya sangat besar: bagaimana mempertahankan pertumbuhan sambil memperluas pekerjaan yang layak, mengurangi ketimpangan, dan mencegah delegitimasi institusi. Jawaban atas pertanyaan ini tidak mungkin hanya datang dari pasar. Ia memerlukan kebijakan sosial, pendidikan, perpajakan, industrialisasi, dan regulasi yang saling terhubung. Dengan kata lain, membutuhkan ekonomi politik yang sadar bahwa distribusi sama pentingnya dengan produksi. ([International Labour Organization](#))

7. Pembangunan Manusia dan Kualitas Perubahan

Penting untuk menekankan bahwa pertumbuhan bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah perluasan kapasitas manusia: hidup lebih sehat, lebih terdidik, lebih aman, dan lebih bermartabat. Itulah

sebabnya data UNDP sangat penting dalam membaca ekonomi politik kontemporer. Ketika kenaikan HDI global menjadi yang terendah dalam 35 tahun, maka kita harus mengakui bahwa masalah dunia saat ini bukan sekadar kurangnya output, melainkan menurunnya efektivitas output dalam memperluas kesejahteraan manusia.

Perubahan ini mengandung dua pesan. Pertama, modernisasi ekonomi tidak otomatis menciptakan modernisasi sosial yang merata. Kedua, teknologi dan pertumbuhan dapat berjalan lebih cepat daripada institusi dan distribusi. Maka, bila pembangunan manusia ingin dipulihkan, kebijakan publik harus kembali menempatkan manusia sebagai pusat. AI, perdagangan, investasi, dan reformasi fiskal harus dinilai bukan hanya dari efeknya terhadap PDB, tetapi juga dari efeknya terhadap kesempatan sosial, mobilitas antargenerasi, dan kualitas hidup.

Bagi Indonesia, hal ini sangat relevan. Negara dapat mencatat pertumbuhan yang baik, tetapi bila kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan tidak naik cukup cepat, maka ketahanan jangka panjang akan rapuh. Implikasi ekonominya jelas: produktivitas akan stagnan. Implikasi politiknya juga jelas: masyarakat akan menilai bahwa pertumbuhan tidak benar-benar membuka masa depan yang lebih baik. Maka, pembangunan manusia adalah jembatan antara ekonomi dan legitimasi.

8. Kapitalisme Digital dan AI sebagai Bentuk Baru Kekuasaan

Salah satu perubahan terbesar dalam ekonomi kontemporer adalah munculnya kapitalisme digital yang sangat terkonsentrasi. Bank Dunia menunjukkan bahwa AI sedang mengubah cara orang belajar, bekerja, dan hidup, tetapi negara berpendapatan rendah dan menengah menghadapi tantangan besar untuk mengadopsinya secara efektif dan dalam skala luas. Laporan itu memperkenalkan kerangka "4Cs" sebagai fondasi kesiapan AI: connectivity, compute, context, dan competency. Ini berarti AI tidak cukup dipahami sebagai perangkat lunak; ia

membutuhkan infrastruktur, kapasitas komputasi, data yang relevan, dan keterampilan manusia. ([World Bank](#))

Masalahnya, fondasi tersebut sangat timpang. Bank Dunia menunjukkan bahwa high-income countries mendominasi server, data center, dan layanan cloud. Laporan itu juga mencatat bahwa middle-income economies menyumbang lebih dari 50 persen trafik global ChatGPT hanya enam bulan setelah debutnya, sementara low-income economies tetap sangat kecil porsinya. Ini menandakan bahwa banyak negara berkembang aktif sebagai pengguna AI, tetapi tidak otomatis memiliki posisi kuat sebagai produsen teknologi atau pemilik infrastruktur. ([World Bank](#))

UNCTAD memperlihatkan betapa terpusatnya manfaat AI. Pada 2033, pasar AI diproyeksikan mencapai US\$4,8 triliun. Namun 100 perusahaan—terutama di AS dan Tiongkok—menguasai 40 persen belanja R&D korporasi global, dan 118 negara tidak terwakili dalam forum utama tata kelola AI. UNCTAD juga memperingatkan bahwa AI dapat memengaruhi sampai 40 persen pekerjaan global. Artinya, AI merupakan peluang besar bagi produktivitas, tetapi juga potensi besar bagi ketimpangan dan ketergantungan baru. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Konsentrasi ini tampak pula dalam infrastruktur internet. Kajian Bank Dunia tentang platform digital menunjukkan bahwa enam perusahaan berbasis di AS menghasilkan lebih dari 40 persen arus data internet dunia. Dalam pasar seperti itu, persaingan tidak cukup lagi diukur melalui harga. Ia juga menyangkut kualitas, akses, privasi, interoperabilitas, dan kontrol atas data. Dalam istilah ekonomi politik, ini berarti kekuasaan kontemporer tidak hanya terletak pada modal fisik, tetapi juga pada kepemilikan arsitektur data dan perhatian.

Implikasinya bagi Indonesia sangat besar. Bila Indonesia hanya menjadi pasar pengguna AI dan platform, maka nilai tambah terbesar akan dinikmati pihak lain. Bila Indonesia membangun kapasitas data

center, komputasi, talenta, dan governance digital, maka AI bisa menjadi alat produktivitas nasional. Jadi, pertanyaan strategisnya bukan “apakah Indonesia akan memakai AI,” karena itu sudah terjadi, melainkan “apakah Indonesia akan sekadar mengonsumsi AI atau ikut membangun nilai tambah dan kedaulatannya.” ([World Bank](#))

9. Demokrasi, Legitimasi, dan Masyarakat yang Berubah

Dinamika ekonomi global tidak bisa dipisahkan dari kondisi politik global. V-Dem menunjukkan bahwa demokrasi rata-rata warga dunia telah mundur ke level 1978. Laporan yang sama mencatat bahwa lebih banyak orang kini hidup dalam autokrasi daripada dalam demokrasi, dan hanya 7 persen populasi dunia yang tinggal dalam demokrasi liberal. Selain itu, freedom of expression disebut sebagai aspek demokrasi yang paling sering diserang dalam proses autokratisasi. ([V-Dem](#))

Data ini penting karena ekonomi membutuhkan ruang koreksi. Bila kebijakan ekonomi salah arah, masyarakat memerlukan media bebas, oposisi, akademisi, dan organisasi sipil untuk mengkritiknya. Bila ruang itu menyempit, kesalahan kebijakan lebih sulit diperbaiki. Bahkan kebijakan yang semula dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dapat berubah menjadi alat dominasi. Maka, kemunduran demokrasi bukan sekadar masalah normatif, melainkan juga masalah ekonomi: ia mengurangi kemampuan sistem untuk belajar. ([V-Dem](#))

Di era digital, tantangan ini makin kompleks. Platform digital memperluas akses informasi, tetapi juga mempercepat disinformasi, polarisasi, dan konsentrasi opini. Ketika perusahaan digital mengendalikan arus perhatian sekaligus data pengguna, ruang publik ikut dipengaruhi kepentingan komersial dan politik yang sulit diawasi. Ini menjelaskan mengapa ekonomi digital tidak bisa dipisahkan dari demokrasi digital. Persaingan usaha, perlindungan data, dan kebebasan berekspresi menjadi bagian dari agenda yang sama.

Dengan demikian, masyarakat kontemporer hidup dalam dua jenis tekanan sekaligus: tekanan ekonomi akibat volatilitas, dan tekanan politik akibat penyempitan ruang koreksi. Bila keduanya bertemu, legitimasi institusi mudah runtuh. Maka pembangunan yang berkelanjutan memerlukan lebih dari sekadar pertumbuhan; ia juga memerlukan kepercayaan publik, representasi yang kredibel, dan ruang diskusi yang sehat. ([International Labour Organization](#))

10. Implikasi bagi Indonesia

Indonesia berada dalam posisi yang menarik: di satu sisi memiliki capaian makro yang relatif baik, di sisi lain tetap rentan terhadap tekanan global. BPS melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen pada 2025, lebih tinggi dari 5,03 persen pada 2024. Triwulan IV 2025 tumbuh 5,39 persen year-on-year, dan ekspor barang serta jasa tumbuh 7,03 persen dalam setahun penuh. Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki basis permintaan domestik dan daya ekspor yang cukup kuat. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dari sisi sosial, ada juga perkembangan positif. BPS mencatat persentase penduduk miskin turun menjadi 8,25 persen pada September 2025, setara 23,36 juta orang. Gini ratio turun menjadi 0,363, dari 0,375 pada Maret 2025 dan 0,381 pada September 2024. Data ini memberi sinyal bahwa pertumbuhan Indonesia pada 2025 tidak sepenuhnya terputus dari distribusi yang lebih baik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Namun capaian ini tidak boleh dibaca secara terlalu optimistis. BPS juga menunjukkan kemiskinan perdesaan masih 10,72 persen, jauh di atas kemiskinan perkotaan 6,60 persen. Gini ratio perkotaan juga lebih tinggi daripada perdesaan, yakni 0,383 berbanding 0,295. Ini menandakan bahwa dualisme wilayah dan struktur sosial-ekonomi Indonesia masih kuat. Pertumbuhan dan penurunan ketimpangan terjadi, tetapi belum menghapus kesenjangan spasial dan kualitas kesempatan hidup. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bank Indonesia pada Januari 2026 memperkirakan pertumbuhan Indonesia 2026 berada dalam kisaran 4,9–5,7 persen, didukung permintaan domestik dan kebijakan pro-growth. Namun BI juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Hal itu terbukti beberapa bulan kemudian ketika rupiah mencapai rekor terendah Rp17.090 per dolar AS pada 7 April 2026 dan BI harus mengintervensi pasar spot, NDF, dan obligasi untuk menjaga stabilitas. ([Bank Indonesia](#))

Peristiwa tersebut penting karena menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tetap sangat terhubung dengan dinamika global. Ketika perang, harga minyak, dan sentimen risiko memburuk, kanal nilai tukar segera menjadi jalur transmisi. Ini berarti strategi pembangunan Indonesia tidak bisa berhenti pada pertumbuhan domestik. Indonesia harus memperdalam ketahanan eksternalnya: kualitas cadangan devisa, efisiensi impor energi, diversifikasi ekspor, pendalaman pasar keuangan domestik, dan peningkatan nilai tambah industri. ([Reuters](#))

11. Agenda Strategis untuk Indonesia

Dari perspektif ekonomi politik, Indonesia memerlukan beberapa agenda strategis. Pertama, memperkuat negara secara selektif dan akuntabel. Negara perlu lebih mampu mengoordinasikan industrialisasi, energi, pangan, infrastruktur digital, dan perlindungan sosial. Tetapi penguatan negara harus dibarengi transparansi dan evaluasi, agar kebijakan strategis tidak berubah menjadi rente. Tantangannya bukan memilih antara negara atau pasar, melainkan membuat negara cukup kuat untuk memandu transformasi tanpa mematikan kompetisi dan koreksi publik.

Kedua, Indonesia perlu memindahkan fokus dari pertumbuhan kuantitatif ke pertumbuhan berkualitas. Data BPS menunjukkan kinerja makro cukup baik, tetapi data global dari ILO dan UNDP mengingatkan bahwa kualitas pekerjaan dan kualitas pembangunan manusia tidak boleh diabaikan. Indonesia perlu memperbesar

penciptaan kerja formal, meningkatkan produktivitas UMKM, memperbaiki pendidikan dan pelatihan, serta membangun perlindungan sosial yang lebih adaptif terhadap pekerjaan nonstandar dan transisi teknologi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Ketiga, agenda kedaulatan digital harus menjadi bagian dari strategi nasional. Ini bukan berarti menutup diri, melainkan membangun posisi tawar. Indonesia perlu menyiapkan data center, kebijakan data, keterampilan AI, infrastruktur komputasi, dan ekosistem riset yang memungkinkan adopsi AI menghasilkan nilai tambah lokal. Bila tidak, Indonesia akan menjadi pengguna besar tetapi pencipta nilai kecil. Laporan Bank Dunia dan UNCTAD memperlihatkan bahwa ini adalah risiko nyata bagi banyak negara berkembang. ([World Bank](#))

Keempat, legitimasi politik harus dipelihara melalui hasil yang nyata dan institusi yang terbuka. Ketika dunia makin tidak pasti, godaan untuk memusatkan kuasa selalu besar. Tetapi justru dalam situasi seperti itu Indonesia memerlukan demokrasi yang substantif: kebijakan yang efektif, komunikasi publik yang jujur, dan ruang kritik yang sehat. Pelajaran global dari V-Dem menunjukkan bahwa negara yang semakin kuat tanpa pengawasan publik berisiko kehilangan keseimbangan. ([V-Dem](#))

12. Penutup

Ekonomi dan politik kontemporer memperlihatkan bahwa pertumbuhan, ketimpangan, dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan. Dunia masih bertumbuh, tetapi pertumbuhannya melambat dan rapuh. Perdagangan masih berlangsung, tetapi semakin dibayangi tarif dan ketidakpastian kebijakan. Negara kembali menjadi aktor utama, tetapi sering kali dalam situasi ketika demokrasi sedang melemah. AI menawarkan produktivitas baru, tetapi juga memusatkan kekuasaan pada sedikit negara dan perusahaan. Semua ini menunjukkan bahwa persoalan zaman kita bukan semata bagaimana menumbuhkan

ekonomi, melainkan bagaimana menata relasi antara negara, pasar, teknologi, dan masyarakat agar pertumbuhan itu bermakna. ([IMF](#))

Bagi Indonesia, perspektif global ini membawa dua pelajaran. Pertama, capaian makro yang baik harus dijaga, tetapi tidak boleh membuat kita mengabaikan kerentanan struktural. Kedua, strategi ke depan tidak bisa lagi sekadar bertumpu pada keterbukaan pasar atau stabilitas jangka pendek. Indonesia memerlukan negara yang lebih cerdas secara strategis, masyarakat yang lebih siap secara keterampilan, dan institusi yang lebih kuat secara legitimasi.

Pertumbuhan 5,11 persen, kemiskinan 8,25 persen, dan gini ratio 0,363 adalah modal penting, tetapi masa depan akan sangat ditentukan oleh apakah modal itu dapat diterjemahkan menjadi produktivitas, keadilan, dan ketahanan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pada akhirnya, ekonomi politik kontemporer mengajarkan bahwa pasar tidak pernah sepenuhnya netral, dan politik tidak pernah sepenuhnya terlepas dari persoalan kesejahteraan. Tantangan Indonesia bukan sekadar menjadi lebih kaya, tetapi menjadi lebih tangguh, lebih adil, dan lebih berdaulat dalam dunia yang berubah. Itu menuntut negara yang strategis tetapi akuntabel, pasar yang inovatif tetapi tidak monopolistik, dan masyarakat yang produktif tetapi tidak ditinggalkan menghadapi risiko zaman sendirian. ([IMF](#))

Glosarium

Autokrasi

Sistem politik yang memusatkan kekuasaan pada sedikit aktor dan membatasi kompetisi politik, kebebasan sipil, atau akuntabilitas publik.

V-Dem melaporkan bahwa 74 persen populasi dunia hidup dalam autokrasi pada 2025. ([V-Dem](#))

Demokrasi liberal

Bentuk demokrasi yang bukan hanya memiliki pemilu, tetapi juga rule of law, kebebasan sipil, dan checks and balances. Menurut V-Dem, hanya 7 persen populasi dunia hidup dalam demokrasi liberal pada 2025. ([V-Dem](#))

Ekonomi politik

Pendekatan analitis yang mempelajari hubungan timbal balik antara kekuasaan, institusi, pasar, distribusi sumber daya, dan legitimasi sosial. Dalam konteks sekarang, ia penting untuk membaca tarif, regulasi data, AI, dan distribusi pembangunan.

Geoeconomics

Penggunaan instrumen ekonomi—seperti tarif, sanksi, investasi, kontrol ekspor, dan rantai pasok—untuk tujuan strategis dan politik. Fenomena ini semakin menonjol dalam fragmentasi perdagangan global.

Trade policy uncertainty

Ketidakpastian tentang arah kebijakan perdagangan di masa depan, termasuk tarif dan hambatan perdagangan lain. WTO menilai ketidakpastian ini mengurangi investasi, arus dagang, dan pertumbuhan.

Gini ratio

Ukuran statistik ketimpangan distribusi pengeluaran atau pendapatan. Semakin tinggi angkanya, semakin timpang distribusinya. BPS mencatat gini ratio Indonesia 0,363 pada September 2025. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

HDI (Human Development Index)

Indeks pembangunan manusia yang menggabungkan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. UNDP menyatakan kenaikan HDI global

terbaru merupakan yang terendah sejak pencatatan dimulai 35 tahun lalu.

Working poverty

Kondisi ketika seseorang bekerja tetapi tetap hidup dalam kemiskinan atau penghasilan yang terlalu rendah. ILO mencatat working poverty global telah kembali ke tingkat pra-pandemi. ([International Labour Organization](#))

Connectivity, Compute, Context, Competency (4Cs)

Empat fondasi kesiapan AI menurut Bank Dunia: konektivitas, komputasi, konteks data, dan kompetensi manusia. Kerangka ini menekankan bahwa AI memerlukan fondasi ekonomi-politik yang luas, bukan sekadar aplikasi. ([World Bank](#))

Konsentrasi pasar digital

Keadaan ketika platform, data, cloud, atau infrastruktur digital dikuasai oleh sedikit perusahaan besar. Bank Dunia menunjukkan bahwa arus data internet global sangat terkonsentrasi.

Ketahanan ekonomi

Kemampuan suatu ekonomi menyerap, beradaptasi, dan pulih dari guncangan seperti perang, disrupsi energi, atau volatilitas keuangan. Ini menjadi tema sentral dalam dunia yang makin terfragmentasi. ([Reuters](#))

Referensi (APA 7)

Badan Pusat Statistik. (2026, February 5). *Indonesia's economic growth in 2025 was 5.11 percent*. Statistics Indonesia. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, February 5). *Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen*. Badan Pusat Statistik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, February 5). *The Gini ratio in September 2025 was 0.363*. Statistics Indonesia. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026, January 21). *BI-Rate held at 4.75%: Strengthening economic growth, maintaining stability*. Bank Indonesia. ([Bank Indonesia](#))

International Labour Organization. (2025, January 16). *Economic recovery is losing steam, new ILO report says*. ILO. ([International Labour Organization](#))

International Monetary Fund. (2025). *World economic outlook, October 2025: Global economy in flux, prospects remain dim* (Chapter 1). IMF. ([IMF](#))

Reuters. (2026, April 6). *Middle East war means "all roads" lead to higher prices, slower growth, IMF chief says*. Reuters. ([Reuters](#))

Reuters. (2026, April 7). *From falling U.S. wealth to Indian factory closures, oil shock raises global recession risk*. Reuters. ([Reuters](#))

Reuters. (2026, April 7). *Indonesia's central bank intervenes in FX market after the rupiah hits a record low*. Reuters. ([Reuters](#))

Reuters. (2026, April 2). *Global central banks mostly on hold as war muddies economic outlook*. Reuters. ([Reuters](#))

United Nations Conference on Trade and Development. (2025, April 7). *AI's \$4.8 trillion future: UN Trade and Development alerts on divides, urges action*. UNCTAD. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

United Nations Conference on Trade and Development. (2025, April 7). *Technology and innovation report 2025: Inclusive artificial intelligence for development*. UNCTAD. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

United Nations Development Programme. (2025). *Human development report 2025: A matter of choice—People and possibilities in the age of AI*. UNDP.

V-Dem Institute. (2026). *Democracy report 2026: Unraveling the democratic era?* University of Gothenburg. ([V-Dem](#))

World Bank. (2021). *Antitrust and digital platforms: An analysis of global patterns and approaches by competition authorities*. World Bank.

World Bank. (2025). *Digital progress and trends report 2025: Strengthening AI foundations*. World Bank. ([World Bank](#))

World Trade Organization. (2025). *Global trade outlook and statistics, April 2025*. WTO.

Perkembangan terbaru yang relevan dengan tema ini:

[Reuters](#)

[Reuters](#)

[Reuters](#)

[Reuters](#)

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 8 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69d6386a-621c-83a0-bebe-7b2a4b62b7c5>